



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



RENJA INDUK TAHUN 2021

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran tanpa menutup kemungkinan di suatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan dasar di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, masih terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua ASN akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo ini, diharapkan apa yang dituangkan di dalamnya dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2021.

Tilamuta, 2021
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si
NIP. 19691222 199801 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Induk	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	7
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	12
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.....	17
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	18
3.4. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	19
3.5. Program dan Kegiatan	19
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	22
BAB V : PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2021 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 yang merupakan dokumen perencanaan tahun keempat pada Renstra Tahun 2017-2022 yang masuk dalam perodesasi RPJPD Tahun 2011-2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017-2022. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 juga berpedoman pada dokumen RPJMD, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang, penyusunan Renja memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun lalu berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, menyusun Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2021.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031.
20. Peraturan Daerah kabupaten Boalemo nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang handal yang akan dilaksanakan Tahun 2021.
- b. Sebagai pedoman Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyusunan RKA – OPD Tahun 2021
- c. Sebagai tolok ukur OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

- | | |
|----------|--|
| BAB I | Merupakan <i>Bab Pendahuluan</i> yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan. |
| BAB II | Merupakan <i>Bab Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu</i> yang memuat Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| BAB III | Merupakan <i>Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</i> yang akan memuat Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan. |
| BAB IV | Merupakan <i>Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</i> yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dalam kurun waktu 2021. |
| BAB V | Merupakan <i>Bab Penutup</i> , yang memuat Catatan Penting, Kaidah-aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut. |
| LAMPIRAN | Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32 dan Tabel T-C.33 |

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dan Capaian Renstra sebagai berikut :

1. Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2020 yaitu terdiri dari 9.622 jiwa Jamkesda, 11.124 jiwa Jamkesta dan 68.729 jiwa PBI APBN, total yang terlayani adalah 89.475 jiwa dari yang ditargetkan 123.000 jiwa.
2. Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - Pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial terus dilakukan, agar Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat terus meningkat sebagai lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, target kinerja 4 kali terealisasi 4 kali.
 - Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di laksanakan dalam bentuk Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Kabupaten serta melakukan evaluasi-evaluasi terhadap program PKK Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, capaian target kinerja 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan.
 - Jumlah Desa yang memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa pada Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa sesuai target 82 Desa, terealisasi 82 Desa.
 - Kegiatan monitoring dan evaluasi tetap di laksanakan di 82 (delapan puluh dua) desa meskipun tanpa didukung oleh anggaran yang memadai, capaian target kinerja 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan.
 - Jumlah Dokumen Administrasi Kantor yang dibuat pada Kegiatan Penyediaan Jasa terealisasi sesuai target 7 Dokumen.

- Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terus di maksimalkan, sesuai target kinerja yaitu 20 kali.
3. Untuk program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan meningkatkan penghasilan serta kemitraan usaha yang saling menguntungkan bagi kelompok penerima, jumlah penerima bantuan di Tahun 2020 adalah 44 kelompok dari yang di targetkan 35 kelompok.

Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2020 terdapat Program/Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target, sesuai target dan yang melebihi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Dokumen Renstra OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, maka untuk Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan Pemberdayaan terdapat Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Tahun 2020 dialokasikan dana dari APBD Kab Boalemo sebesar **Rp. 2.453.004.083,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.194.508.933,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 89,46%** yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur dan kegiatan Pelayanan Publik, indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2020). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Penjelasan Sasaran Dari Capaian Kinerja 2020

- Sasaran 1
Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
 - Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapat Bantuan, ditargetkan 35 Kelompok, realisasi 44 Kelompok.
 - Cakupan yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial ditargetkan 123.000 Jiwa, realisasi 89.475 Jiwa.

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, ditargetkan 4 Kegiatan, realisasi 4 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditargetkan 2 Kegiatan, realisasi 2 Kegiatan
- Sasaran 2
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
 - Jumlah Dokumen Administrasi Kantor ditargetkan 7 Dokumen, realisasi 7 Dokumen
 - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ditargetkan 20 Kali, Realisasi 20 Kali
- Sasaran 3
Berkembangnya Ekonomi Desa
 - Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, ditargetkan 100% realisasi 100%
 - Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, ditargetkan 82 Desa realisasi 82 Desa

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas PMD Provinsi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan PMD dalam rangka pencapaian kinerja Pelayanan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stakeholder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa Rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukkan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun yang akan datang.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu :

3. Jumlah sasaran menggunakan data yang estimasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan data riil, sehingga dalam penghitungan capaian data pencapaian kinerja masih dibawah target.
4. Belum terurusnya rencana pencapaian target sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran yang ada
5. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan misi pembangunan pada RPJMD 2017-2022 yaitu Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera sesuai Misi Bupati Boalemo yang dijabarkan dalam RENSTRA OPD 2017-2022.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelayanan Publik, berupa pembinaan dan pengembangan lembaga sosial, lembaga desa dan lembaga ekonomi desa dengan baik dan menyeluruh di Kabupaten Boalemo
- b. Meningkatkan Kompetensi Pegawai yang Tersedia untuk Melaksanakan Tupoksi menuju Standar Pelayanan Prima.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

- a. Terwujudnya konsep pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai arah pembangunan daerah pada lapisan masyarakat bawah.
- b. Terwujudnya pelayanan publik secara prima.
- c. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat diperdekaan dalam kehidupan sosial.

Tantangan-Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Tantangan

Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu :

- Rendahnya kesadaran masyarakat penerima bantuan dalam mengembangkan bantuan yang telah diberikan.
- Sulitnya mengakses data-data kesejahteraan sosial secara cepat dan akurat.
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi dinas lintas sektor.
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Terbukanya peluang Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Boalemo.
- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalemo 2017 -2022, sehingga Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo juga merupakan Renja dalam tahapan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik Pengelola Program Sosial maupun Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Program dan Kegiatan yang bisa menunjang pengurangan angka kemiskinan.
3. Meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan Sumber Daya yang ada di desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil penelaahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2. Meningkatnya ketersediaan bahan makanan bagi para korban bencana alam dan bencana sosial
3. Stabilitasnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat bagi penerima bahan pangan non tunai
4. Terpenuhinya pelayanan perlindungan jaminan sosial kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatnya pembentukan dan pendirian BUMDes di masing masing desa se Kabupaten Boalemo
6. Tercapainya penyelesaian dokumen, perencanaan, pertanggungjawaban dan program yang dilaksanakan di tingkat desa.

Dari penelaahan diatas dapat dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Program dan 8 (delapan) kegiatan serta 10 (sepuluh) Sub Kegiatan sesuai Program Renstra Tahun 2017-2022,

I. Program Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

II. Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan

III. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- VI. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- VII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024, yaitu: ***Kementerian Sosial yang andal Profesional dan Inovatif serta Berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong"***

dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya Visi Pembangunan Nasional.

Tujuan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Indeks Partisipasi Sosial;
 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
 - Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi Pembangunan Indonesia adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** dengan misi terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyerdehanaan Regulasi
Menyederhakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua undang-undang Pemberdayaan UMKM
4. Penyerdehanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : ***"Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;

6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
 - Jumlah desa mandiri
 - Jumlah desa berkembang
 - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
 - Persentase penurunan angka kemiskinan
5. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes berkembang
 - Jumlah Bumdes maju
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :
 - Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :

- Penyerapan tenaga kerja perdesaan
9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
- Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
- Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
- Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
- Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :
- Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
- Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
 - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
- Nilai Reformasi Birokrasi
16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
- Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
- Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah Sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan 4 (Empat) misi yaitu:

1. Mendorong dan Mendukung Perluasan Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan Masyarakat.
3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegotongroyongan dan Tanggungjawab/Kepedulian Sosial.
4. Mengembangkan Potensi dan Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dengan mengacu kepada pada Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo adalah Sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan 3 (Tiga) misi yaitu:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan Adil.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Terciptanya Pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Potensi Pengembangan Hutan Produksi;
- b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- d. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- e. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan;

- g. Potensi Pengembangan Kawasan Industri;
- h. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- i. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- j. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan; dan
- l. Potensi Pengembangan Pertambangan.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Mengembangkan perekonomian perdesaan
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kegiatan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
2. Berkembangnya ekonomi desa
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

3.5. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD 2017-2022, dan rancangan awal RKPD 2021, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penanganan Bencana
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu Tahun 2021 sesuai target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Tilamuta,

2021

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2021
Kabupaten Boalemo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	6	Bidang Sosial													
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	3.00	3.00					
1	06	01	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	- Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	40	2.00		
1	06	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	- Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	40	2.00
1	06	01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100	7 Dok	21	3.00		
1	06	01	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	7 Dok	100	7 Dok	21	3.00		
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	70%	50 %	60%	100%	167	70%	2.20	3.14	
1	06	02	2.02		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	10	2.50	
1	06	02	2.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	10	2.50	
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40%	106%	20%	73%	365	40%	2.19	5.48	
1	06	04	2.02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133,000 Jiwa	120,293 Jiwa	123,000 Jiwa	89,475 Jiwa	73	133,000 Jiwa	342,768	2.58	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Org	50 Org	150 Org	25 Org	17	150 Org	225	1.50		

1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133,000 Jiwa	120,293 Jiwa	123,000 Jiwa	89,475 Jiwa	73	133,000 Jiwa	342,768	2.58
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Org	50 Org	150 Org	25 Org	17	150 Org	225	1.50
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100%	84%	100%	103%	103	100%	287%	2.87	
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	51 Kel.	35 Kel.	44 Kel.	126	35 Kel.	130	3.71
						Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13,028 KK	10,914 KK	13,028 KK	13,432 KK	103	13,028 KK	37,374	2.87
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	51 Kel.	35 Kel.	44 Kel.	126	35 Kel.	130	3.71
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13,028 KK	10,914 KK	13,028 KK	13,432 KK	103	13,028 KK	37,374	2.87
1	06	06	Program Penanganan Bencana		Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40%	153%	20%	1073%	5,365	40%	12.66	31.65	
1	06	06	2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4,000 Jiwa	6,139 Jiwa	4,000 Jiwa	42,938 Jiwa	1,073	4,000 Jiwa	53,077	13.27
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4,000 Jiwa	6,139 Jiwa	4,000 Jiwa	42,938 Jiwa	1,073	4,000 Jiwa	53,077	13.27
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	13		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	70 Desa	82 Desa	65 Desa	82 Desa	126	70 Desa	234	3.34	
						Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	75%	-	70%	100%	143	75%	1.75	2.33
2	13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3.00	3.00

						Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	- Org	82 Org	82 Org	100	82 Org	164	2.00
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	3.00	3.00
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	- Org	82 Org	82 Org	100	82 Org	164	2.00
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	75%	100%	70%	100%	143	75%	2.75	3.67
2	13	05	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3.00
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3.00

Tilamuta, Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Mina

FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Boalemo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		- -	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	- Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	
2	Jumlah Dokumen Adminstrasi Kantor	-	- -	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	
3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	-	- -	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	
4	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	50 Orang	25 Orang	150 Orang	150 Orang	
5	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	-	- -	113,000 Jiwa	123,000 Jiwa	133,000 Jiwa	143,000 Jiwa	120,293 Jiwa	89.475 Jiwa	133,000 Jiwa	143,000 Jiwa	
6	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	-	- -	35 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	51 Kel.	44 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	
7	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan			13,028 KK	13,028 KK	13,028 KK	13,028 KK	10,914 KK	13,432 KK	13,028 KK	13,028 KK	
8	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial			4,000 Jiwa	4,000 Jiwa	4,000 Jiwa	4,000 Jiwa	6,139 Jiwa	42,938 Jiwa	4,000 Jiwa	4,000 Jiwa	
9	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	- -	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			82 Orang	82 Orang	82 Orang	82 Orang	-	-	82 Orang	82 Orang	
11	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-	- -	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	

Tilamuta, Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial dan PMD	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	523,980,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial dan PMD	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	523,980,000	
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Pusat	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	250,000,000	1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Pusat	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	250,000,000	
	1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	250,000,000	1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	250,000,000	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial dan PMD	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	273,980,000	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial dan PMD	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	273,980,000	
	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	273,980,000	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	273,980,000	
2	Program Pemberdayaan Sosial	7 Kec	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	70 %	225,750,000	Program Pemberdayaan Sosial	7 Kec	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	70 %	225,750,000	
3	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	225,750,000	3 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	225,750,000	
	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	225,750,000	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	225,750,000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40 %	200,000,000	Program Rehabilitasi Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40 %	200,000,000	
4	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133,000 Jiwa	100,000,000	4 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133,000 Jiwa	100,000,000	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Org	100,000,000			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Org	100,000,000	
	4 Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133,000 Jiwa	100,000,000	4 Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133,000 Jiwa	100,000,000	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Org	100,000,000			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Org	100,000,000	

4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Desa se Kab. Boalemo	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100 %	2,625,130,000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100 %	2,625,130,000		
	5	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	1,357,014,000	5	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	1,357,014,000	
				Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13,028 KK	1,268,116,000				Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13,028 KK	1,268,116,000	
	5	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	1,357,014,000	5	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	1,357,014,000	
	6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13,028 KK	1,268,116,000	6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13,028 KK	1,268,116,000	
5	Program Penanganan Bencana		Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40 %	176,560,000	Program Penanganan Bencana	Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40 %	176,560,000		
	6	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4,000 Jiwa	176,560,000	6	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4,000 Jiwa	176,560,000	
	7	Penyediaan Makanan		Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4,000 Jiwa	176,560,000	7	Penyediaan Makanan		Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4,000 Jiwa	176,560,000	
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	70 Desa	111,120,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	70 Desa	111,120,000		
				Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	75 %	229,524,000		Desa se Kab. Boalemo	Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	75 %	229,524,000		
	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Memasukkan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	111,120,000	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Memasukkan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	111,120,000	
				Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	229,524,000				Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	229,524,000	
	8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Desa yang Memasukkan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	111,120,000	8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Desa yang Memasukkan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	111,120,000	

	9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	229,524,000	9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	229,524,000	
7		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	75 %	452,210,000		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	75 %	452,210,000	
8		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	452,210,000	8	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	452,210,000	
	10	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	452,210,000	10	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	452,210,000	

Tilamuta, Januari 2021
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Mina
FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si
 NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
	Bidang Sosial				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				

Tilamuta, Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Fatlina Podungge

FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	Bidang Sosial									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	Dinas Sosial dan PMD	100 %	804,380,000	DAU/DAK/ PAD		100 %	549,430,000
	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi dan Pusat	20 Kali	193,110,000	DAU/DAK/ PAD		20 Kali	250,000,000
		1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi dan Pusat	20 Kali	193,110,000	DAU/DAK/ PAD		20 Kali	250,000,000
	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	Dinas Sosial dan PMD	7 Dok	611,270,000	DAU/DAK/ PAD		7 Dok	299,430,000
		2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	Dinas Sosial dan PMD	7 Dok	611,270,000	DAU/DAK/ PAD		7 Dok	299,430,000
2	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	Desa se Kab. Boalemo	70 %	126,000,000	DAU/DAK/ PAD		80 %	226,980,000
	3	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	7 Kec	4 Kali	126,000,000	DAU/DAK/ PAD		4 Kali	226,980,000
		3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	7 Kec	4 Kali	126,000,000	DAU/DAK/ PAD		4 Kali	226,980,000
3	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	40 %	549,030,000	DAU/DAK/ PAD		45 %	200,000,000
	4	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	133,000 Jiwa	549,030,000	DAU/DAK/ PAD		143,000 Jiwa	100,000,000
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Org	549,030,000	DAU/DAK/ PAD		150 Org	100,000,000
		4 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	133,000 Jiwa	549,030,000	DAU/DAK/ PAD		143,000 Jiwa	100,000,000
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Org				150 Org	100,000,000

4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Desa se Kab. Boalemo	100 %	351,743,000	DAU/DAK/PAD		100 %	2,651,750,000
	5	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	Kabupaten Boalemo	35 Kel.	319,902,000	DAU/DAK/PAD		35 Kel.	1,383,634,000
			Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Desa se Kab. Boalemo	13,028 KK	31,841,000	DAU/DAK/PAD		13,028 KK	1,268,116,000
	5	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	Kabupaten Boalemo	35 Kel.	319,902,000	DAU/DAK/PAD		35 Kel.	1,383,634,000
	6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Desa se Kab. Boalemo	13,028 KK	31,841,000	DAU/DAK/PAD		13,028 KK	1,268,116,000
5	Program Penanganan Bencana		Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya	Kab. Boalemo	40 %	30,000,000	DAU/DAK/PAD		40 %	207,560,000
	6	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Kab. Boalemo	4,000 Jiwa	30,000,000	DAU/DAK/PAD		4,000 Jiwa	207,560,000
	7	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Kab. Boalemo	4,000 Jiwa	30,000,000	DAU/DAK/PAD		4,000 Jiwa	207,560,000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	Desa se Kab. Boalemo	70 Desa	100,630,000	DAU/DAK/PAD		82 Desa	136,150,000
			Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	75 %	950,000,000	DAU/DAK/PAD		80 %	238,862,000
	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	100 %	100,630,000	DAU/DAK/PAD		100 %	136,150,000
			Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Org	950,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Org	238,862,000
	8	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	100 %	100,630,000	DAU/DAK/PAD		100 %	136,150,000
	9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Org	950,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Org	238,862,000

7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	Kab. Boalemo	75 %	122,966,000	DAU/DAK/PAD		80 %	477,980,000
8	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	2 Keg.	122,966,000	DAU/DAK/PAD		2 Keg.	477,980,000
10	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	2 Keg.	122,966,000	DAU/DAK/PAD		2 Keg.	477,980,000

Tilamuta, Januari 2021
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Fatlina Podungge

FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001